

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (www.kemenkeu.go.id) . Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Pajak yang disetorkan merupakan transfer kekayaan dari pihak perorangan maupun perusahaan kepada negara sebagai bentuk pembayaran atas beban yang diberikan kepada perusahaan.

Berikut adalah data realisasi pendapatan penerimaan atas pajak selama enam tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2014-2019
(Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Sumber Penerimaan		
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2014	1.545.456,30	398.590,50	5.034,50
2015	1.496.047,33	255.628,48	11.973,04
2016	1.546.946,60	261.976,30	8.987,70
2017	1.654.746,10	311.216,30	11.629,80
2018	1.928.110,00	409.320,20	15.564,90
2019	1.643.083,90	386.333,90	1.340,00
Total	9.814.390,23	2.023.065,68	54.529,94
%	82,5	17	0,5

Sumber : www.bps.go.id (2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama enam tahun pendapatan penerimaan atas pajak mengindikasikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yaitu 82,5% dibanding Penerimaan bukan pajak sebesar 17% dan hibah 0,5%, ini menunjukkan bahwa pendapatan penerimaan atas pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan upaya/kegiatan patuh pajak guna kesejahteraan dan pembangunan masyarakat segera terealisasi (Diantari dan Ulupui, 2016).

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016). Wajib pajak juga tidak mendapat imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016).

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya melakukan

penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Jacob, 2014 dalam Diantari dan Ulupui, 2016).

Dalam praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya meskipun cara tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena pendapatan negara dari pajak tidak maksimal. Untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak (Karayan dan Swenson, 2007 dalam Pramudito dan Sari, 2015). Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan kehadiran *effective tax rate* (ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng *et al.*, 2007 dalam Pramudito dan Sari, 2015).

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu

dianakemaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global tahun 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada tahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang memegang surat izin usaha pertambangan pada 2015 yakni 8003 WP dan masih terdapat 4.532 WP yang tidak memiliki SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar, namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting*, dan *transfer mispricing*. (Ah Maftuchan, Katadata.co.id, 2019).

Salah satu contoh fenomena penghindaran pajak adalah kasus dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang

mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Dugaan DJP secara materil memang tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. (Ah Maftuchan, Katadata.co.id, 2019).

Fenomena yang lain terjadi pada PT Adaro Energy melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International, telah berhasil membayar pajak di Indonesia 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayar atau mengurangi hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya, dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak. Laporan keuangan Coaltrade di Singapura meningkat rata-rata tahunan 4 juta dolar AS sebelum 2009, dan 55 juta dolar AS dari tahun 2009 sampai 2017. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan yang didapat dengan pengenaan pajak 10% rata-rata per tahun. Keuntungan dari penjualan di Singapura hasil dari penambangan batu bara di Indonesia sekitar 70% dan seharusnya dikenakan tarif pajak lebih tinggi yaitu 50% apabila dijual di Indonesia. Pada tahun 2008, PT Adaro Energy juga membayar 33 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa dengan Otoritas Pajak Indonesia terkait bisnis dengan Coaltrade, dan sebelum tahun 2017 PT Adaro mengalihkan keuntungan dari

Singapura ke salah satu perusahaan anaknya di Mauritius yang dimana negara tersebut tidak dikenakan pajak. (Stuart McWilliam, Globalwitness.org, 2019).

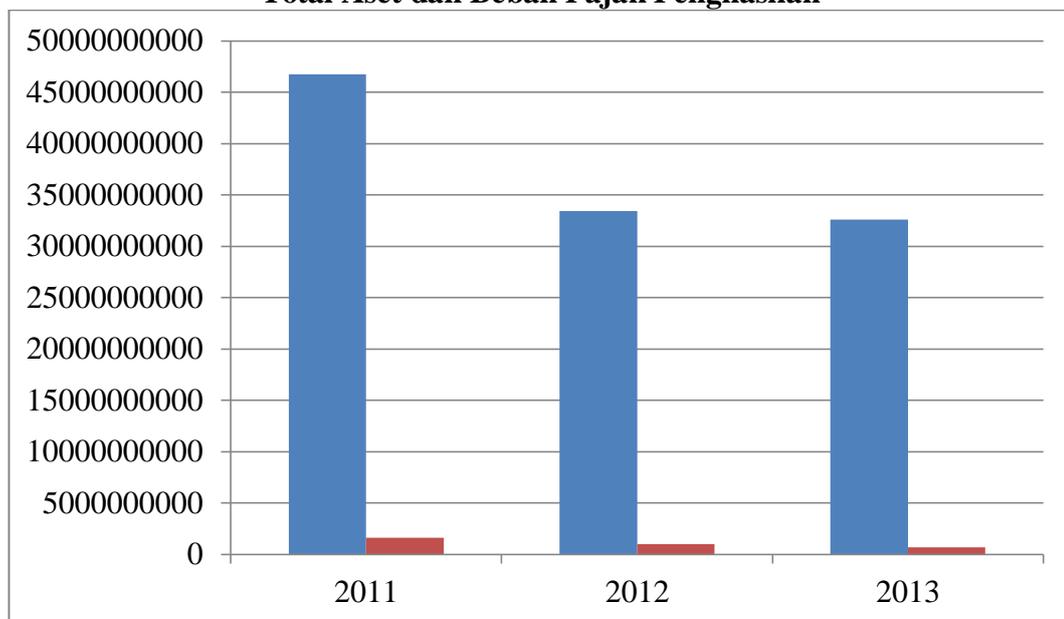
Kasus di atas menunjukkan bahwa masih maraknya penghindaran pajak oleh perusahaan di industri pertambangan Indonesia, dimulai dari kurang bayar besaran pajak hingga melakukan *transfer pricing* pada anak perusahaan yang berada di luar negeri untuk memaksimalkan keuntungan dan menurunkan beban pajak. Meskipun penghindaran pajak dianggap legal, namun hal tersebut tetap merugikan bagi negara.

Firm Size (ukuran perusahaan) merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016) .

Fenomena ukuran perusahaan didapat dari pengolahan data laporan keuangan 19 perusahaan (menjadi 16 perusahaan dengan berbagai pertimbangan)

yang dijadikan sampel dalam penelitian ditunjukkan oleh grafik 1.1 dibawah, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Total Aset dan Beban Pajak Penghasilan



Sumber: Olahan penulis

Keterangan:

- = Total Aset
- = Beban Pajak Penghasilan

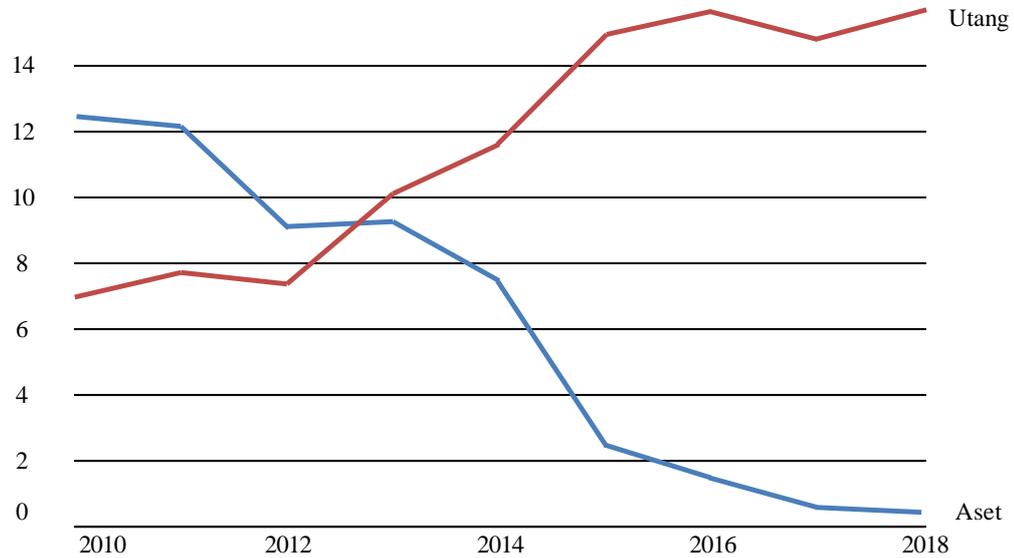
Grafik 1.1 menunjukkan bahwa penurunan total aset menyebabkan penurunan beban pajak yang juga diartikan bahwa kenaikan aset akan menyebabkan kenaikan beban pajak penghasilan yang dikeluarkan perusahaan. Berdasarkan grafik diatas mengenai ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset bisa menjadi salah satu faktor dalam menentukan beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam manajemen pajak didalamnya termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain ukuran perusahaan, faktor berikutnya adalah kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari kondisi *financial distress* perusahaan. Perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak guna mengurangi pajak yang harus dibayarkannya sehingga dapat mengurangi beban perusahaan. *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*financial distress condition*) atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami (Haryetti, 2010 dalam Meilia dan Adnan, 2017). Apabila tingkat risiko kebangkrutan dianggap cukup tinggi maka perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut Richardson *et al.* (2015) dalam Putri dan Chariri (2017), terdapat beberapa implikasi pada peraturan pajak perusahaan ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Sebagai contoh, meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami

krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak.

Fenomena mengenai *financial distress* di Indonesia terjadi pada PT Dok dan Kodja Bahari yang memperoleh nilai -1,72 dengan menggunakan prediksi Altman *Z-Score*. (Lorenzo Anugrah Mahardika, m.Bisnis.com, 2019). Kasus lain terjadi pada PT Bakrie Telecom Tbk pada tanggal 27 Mei 2019 yaitu pada saat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi (penghentian sementara) perdagangan saham pada PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dengan salah satu alasan bahwa PT Bakrie Telecom Tbk masuk dalam kategori *financial distress* atau kesulitan keuangan. Tercatat pada akhir kuartal 2016 total aset BTEL hanya Rp 738,95 miliar dari sebelumnya Rp 12,35 triliun pada akhir tahun 2010. Adapun total utang perusahaan menggelembung lebih dari dua kali lipat (120,99%) pada periode tersebut, dari hanya Rp 7,16 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 15,82 triliun diakhir September 2018. Alhasil dengan kondisi tersebut, maka nilai ekuitas perusahaan otomatis tercatat negatif 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2013. (Dwi Ayuningtiyas, Cnbcindonesia.com, 2019). Berikut ini perolehan aset dan utang PT Bakrie Telecom Tbk dapat dilihat dalam grafik 1.1 sebagai berikut :

Grafik 1.2
Perolehan Aset dan Utang (Triliun Rp)



Sumber: www.cnbcindonesia.com (2019)

Berdasarkan grafik di atas kesulitan keuangan ditunjukkan dari kenaikan utang dan penurunan aset yang diartikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan. Jika aset perusahaan terus menurun maka perusahaan akan cenderung untuk menurunkan beban-beban yang ditanggung perusahaan termasuk beban pajak penghasilan yang didalamnya termasuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan akan beban pajak perusahaan berkurang.

Konservatisme akuntansi ialah salah satu prinsip yang dianut dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Konservatisme merupakan reaksi kehati-hatian atas ketidakpastian yang akan terjadi dan ketidakpastian risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai (Susanti, 2018). Reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen manajemen untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan. Faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam

laporan keuangan perusahaan adalah reaksi *Proudence*. *Prudence* dianggap sebagai pembatasan prinsip konservatisme akuntansi pada batasan yang wajar (Wang, 2009 dalam Ardina, 2012). *Prudence* lebih berfokus pada kehati-hatian dalam melakukan penilaian pada keadaan yang tidak pasti pada suatu perusahaan, sehingga penilaian perusahaan terhadap aset, utang dan lainnya memang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa rekayasa.

Akuntansi konservatisme memberikan dampak berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Dengan semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan juga lebih rendah. Perusahaan akan cenderung berusaha menurunkan nilai kini pajak penghasilannya untuk menaikkan nilai perusahaan (Watts, 2003 dalam Dwimulyani, 2010). Menurut Sundari (2017) semakin konservatif suatu laporan keuangan, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin kecil dikarenakan akan semakin besar pula pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan.

Fenomena konservatisme akuntansi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya yang bergerak di bidang pertambangan. Contohnya adalah manipulasi laporan keuangan di Indonesia yaitu PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) pada tahun 2013 yang terdeteksi melakukan pemalsuan laporan keuangan perseroan periode 2012 yang tidak sesuai. (Ahmad Nabhani, Neraca.co.id, 2013). Selain itu PT Hanson Internasional Tbk pada tahun 2016 yang telah melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan terkait dengan adanya penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai *gross* Rp 732

miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, PT Hanson Internasional Tbk melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK44). (Muhammad Idris, Kompas.com, 2020).

Kasus di atas mengindikasikan rendahnya penerapan prinsip konservatisme oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan prinsip konservatisme yang kurang baik ini juga terlihat dari manajer yang memiliki ekuitas tinggi di perusahaan akan menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk mengambil keputusan yang gegabah, termasuk didalamnya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh ukuran komite audit. Keberadaan komite audit memiliki peranan yang penting untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* (GCG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik (Pohan, 2008 dalam Oktamawati, 2017). Tanggungjawab komite audit dalam *corporate governance* (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Rani, 2017). Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang

efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Rani 2017). Dari hal tersebut, komite audit memiliki wewenang untuk dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan, akibatnya dengan adanya komite audit dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2016).

Fenomena mengenai komite audit meliputi beberapa kasus, salah satunya terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kasus PT KAI berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komite audit dimana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal, dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat tersaji secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus PT KAI ini yaitu karena laporan keuangan yang rumit dan terpisah setiap stasiunnya, sehingga memiliki potensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat pada kemudian hari. (Meula, Kompasiana.com, 2017). Kasus lainnya terjadi pada PT Garuda, dimana komite audit mengungkapkan adanya kasus penyelundupan barang ilegal yang melibatkan jajaran Direksi Garuda dalam manifest penumpang pesawat baru PT Garuda yang dianggap melanggar surat edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai perjalanan dinas luar negeri. (Febia Rosada Fitriani, Tribunnews.com, 2019).

Kasus di atas menyatakan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak salah saji dan mampu

menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang semestinya, termasuk didalamnya komite audit yang merupakan bagian dari komisaris independen.

Kasus diatas menjadi salah satu motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini dengan alasan untuk mengetahui pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, dan komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk mencegah terjadi penghindaran pajak yang merugikan bagi perusahaan dan pemerintah. Objek yang akan dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

Pada penelitian ini, penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Bambang Setyobudi Irianto, *et al.* (2017), meneliti mengenai *The Influence of Probability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Toward Tax Avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2013-2015*. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, dan *Leverage*, *Probabilitas*, *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015), meneliti mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Konservatisme Akuntansi dan Ukuran Dewan Komisaris

tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara negatif pada *Tax Avoidance*.

Camelia Mayang Susanti (2018), meneliti mengenai Pengaruh Konservatisme, *Leverage*, Probabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Profitabilitas Berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Elisa Tjondro, *et al* (2018), meneliti mengenai *Role of Audit Committee in Tax Avoidance of Family and Non-Family Firms: Evidence from Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite audit memoderasi pertukaran antara penghindaran pajak dan biaya utang, tetapi sebaliknya. Peran komite audit tidak terbukti mengurangi praktik trade-off, sebaliknya meningkatkan biaya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan pembayaran pajak dan meningkatkan resiko pajak. Setelah analisis lanjutan penelitian ini menemukan bukti bahwa peran komite audit lebih kuat di perusahaan bukan milik keluarga daripada di perusahaan keluarga. Efek moderasi komite audit ditemukan tidak signifikan di perusahaan keluarga, meskipun memiliki efek signifikan pada perusahaan bukan milik keluarga.

Garry C. Biddle *et al.* (2019), meneliti mengenai *Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk in United State*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Accounting Conservatism* membantu menurunkan *Bankruptcy Risk* diseluruh rangkaian kondisi keuangan dan dilakukan melalui peningkatan kas dan saluran mitigasi manajemen pendapatan dengan penetapan standar akuntansi, regulasi

keuangan, manajemen risiko keuangan, dan membantu menjelaskan keberadaan lama konservatisme sebagai alat melalui akuntansi keuangan.

Harry Barli (2018), meneliti mengenai Pengaruh *Leverage* dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan sektor Property, Real Estate, dan Building construction yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, tetapi secara simultan *Leverage* dan *Firm Size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hustna Dara Sarra (2017), meneliti mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan negatif dan Dewan Komsaris Independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak.

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), meneliti mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Mayarisa Oktamawati (2017), meneliti mengenai Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Mehdi Feizi *et al.* (2016), meneliti mengenai *The Impact of the Financial distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange* (TSE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi krisis keuangan global serta kesulitan keuangan perusahaan menimbulkan penghindaran pajak perusahaan.

Mustafa Hashemi Tilehnouei *et al.* (2018), meneliti mengenai *Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dari perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange.

Nila Sari *et al.* (2017), meneliti mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas audit, Ukuran perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Konservatisme Akuntansi dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Norlia Mat Norwani (2018), meneliti mengenai *The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufacture*

Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Firm Size* dan *family Ownership* berpengaruh negatif terhadap *Aggressive Tax Avoidance*, sedangkan *Foreign Ownership* berpengaruh positif terhadap *Aggressive Tax Avoidance*.

Puspita Rani (2017), meneliti mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *Financial distress* dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Putri Meilia dan Adnan (2017), meneliti mengenai Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), meneliti mengenai Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit Pada *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa Profitabilitas dan Komite Audit tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016), meneliti mengenai Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Proporsi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), meneliti mengenai Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hasil dari Penelitian ini menyatakan bahwa *Financial Distress*, Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Manajerial Ownership* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Richmadenda dan Dudi Pratomo (2018), meneliti mengenai *The Influence of Audit Tenure, Audit Committee, and Firm Size To Tax Avoidance on Food and Drink Sub Sectors Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-2016*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Rimi Gusliana Mais dan Dewi Patminingsih (2017), meneliti mengenai *Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of The Company in Listed of The Indonesia Stock Exchange (BEI)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Ukuran Komisaris Independen,

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Taufiq Marwa (2018), meneliti mengenai *The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variabelsin mining companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2017*. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Financial Distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Tobias Bornemann (2018), meneliti mengenai *Tax Avoidance and Accounting Conservatism on 18 countries 1995 to 2010*. Hasil dari Penelitian ini ditemukan bahwa pada kondisi Konservatisme secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pemotongan tarif pajak dimasa depan ketika kesesuaian buku pajak tinggi. Efek ini sangat menonjol untuk perusahaan yang memusatkan mayoritas operasi mereka di negara dimana tarif pajak dipotong. Sebaliknya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara penghindaran pajak dan kondisi bukan konservatisme.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun dan Lokasi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Bambang Setyobudi Irianto, <i>et al.</i> (2017). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015	Variabel Independen: <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Puposive Sampling	Variabel Independen: Probabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Alat analisis: Regresi Berganda	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Leverage</i> , <i>Probabilitas</i> , <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>International Journal of Accounting and Taxation</i> Volume 5 No. 2 pp. 33-41 (2017) ISSN: 2372-4978 (Print), 2372-4986 (Online)
2	Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris Alat analisis: Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Konservatisme Akuntansi dan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara negatif pada <i>Tax Avoidance</i>	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 13. 3 Desember (2015): 705-722 ISSN: 2303-1018
3	Camelia Mayang Susanti (2018). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Profitabilitas Alat Analisis: Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Profitabilitas Berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Volume 13 No. 2 Juli (2018): 181-198 ISSN: 2685-6441 (Online) 1907-7769 (Print)
4	Elisa Tjondro, <i>et al</i> (2018) . Indonesia tahun 2011-2015	Variabel Independen : <i>Audit Committee</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Alat analisis :	Lokasi Penelitian: Perusahaan keluarga dan Bukan Keluarga yang ada di Indonesia tahun 2011-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite audit memoderasi pertukaran antara penghindaran pajak dan biaya utang, tetapi sebaliknya. Peran komite audit tidak terbukti mengurangi	<i>Journal of Economics and Business</i> , Volume 1 No. 3 (2018): 368-380 ISSN: 2615-3726

		Regresi Data Panel	2015 (Sebelum Program <i>Tax Amnesty</i> 2016)	praktik trade-off, sebaliknya meningkatkan biaya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan pembayaran pajak dan meningkatkan resiko pajak. Setelah analisis lanjutan penelitian ini menemukan bukti bahwa peran komite audit lebih kuat di perusahaan bukan milik keluarga daripada di perusahaan keluarga. Efek moderasi komite audit ditemukan tidak signifikan di perusahaan keluarga, meskipun memiliki efek signifikan pada perusahaan bukan milik keluarga.	
5	Garry C. Biddle <i>et al.</i> (2019). Amerika Serikat	Variabel Independen: <i>Accounting Conservatism</i>	Variabel Depeden: <i>Bankruptcy Risk, Conservatism Channel data</i> Alat analisis: Regresi Sederhana	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa <i>Accounting Conservatism</i> membantu menurunkan <i>Bankruptcy Risk</i> diseluruh rangkaian kondisi keuangan dan dilakukan melalui peningkatan kas dan saluran mitigasi manajemen pendapatan dengan penetapan standar akuntansi, regulasi keuangan, manajemen risiko keuangan, dan membantu menjelaskan keberadaan lama konservatisme sebagai alat melalui akuntansi keuangan.	<i>Social Science Research Network</i> (2019) (http://ssrn.com/abstract=1621272)
6	Harry Barli (2018). Studi pada Perusahaan sektor Property, Real Estate, dan Building	Variabel Independen: <i>Firm Size</i> Variabel Dependen:	Variabel Independen: <i>Leverage</i> Alat analisis: Regresi	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa <i>Firm Size</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, tetapi secara simultan <i>Leverage</i> dan	Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Volume 6 No. 2, Juli (2018)

	construction yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2013-2017	Penghindaran Pajak Teknik Sampling: Purposive Sampling	Berganda	<i>Firm Size</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	ISSN: 2339-0867 (Print) 2599-1922 (Online)
7	Hustna Dara Sarra (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi Komite Audit Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Teknik sampling: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen Alat Analisis: Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan negatif dan Dewan Komsaris Independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak.	<i>Competitive</i> , Volume 1 No. 1.
8	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2011-2014	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Umur perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 12 No. 3 (2016):1584-1613 ISSN: 2302-8556
9	Mayarisa Oktamawati (2017). Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014	Variabel Independen: Komite Audit, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Jurnal Akuntansi Bisnis, Volume 15 No. 1, Maret (2017) ISSN: 1412-775X (Print) 2541-5204 (Online)
10	Mehdi Feizi <i>et al.</i> (2016). Evidence from Tehran Stock Exchange 2008-	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i>	Alat Analisis: Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi krisis keuangan global serta	<i>International Journal of Advanced Biotechnology</i>

2014		Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Lokasi Penelitian: Perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange	kesulitan keuangan perusahaan menimbulkan penghindaran pajak perusahaan.	<i>and Research</i> (IJBR), Volume 7, Issue-1 (2016), pp: 373- 382 ISSN: 0976-2612 (Online) 2278-599X (Print)
11	Mustafa Hashemi Tilehnoei <i>et al.</i> (2018). Companies Listed on Tehran Stock Exchange 2003-2013	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Alat Analisis: Regresi berganda Lokasi Penelitian: Perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kesulitan Keuangan (<i>Financial Distress</i>) dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) dari perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange	<i>International journal of Finance and Managerial Accounting</i> , Volume 3 No. 9 (2018)
12	Nila Sari <i>et al.</i> (2016). Studi pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi, Ukuran perusahaan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax AvoidanceI</i>) Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Kualitas Audit Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Konservatisme Akuntansi dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah (SANCALL) (2016) ISSN: 2460-0784
13	Norlia Mat Norwani (2018). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014	Variabel Independen: <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling:	Variabel Independen: <i>Ownership Structure</i> Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa <i>Firm Size</i> dan <i>family Ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Foreign Ownership</i> berpengaruh positif	<i>Advance in Social Science, Education and Humanities Research</i> , Volume 231 (2018)

		Purposive Sampling		terhadap <i>Aggressive Tax Avoidance</i>	
13	Puspita Rani (2017). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Financial distress</i> , Komite audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Komisaris Independen Alat analisis: Regresi Berganda	Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Financial distress</i> dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 6, No. 2, 2 Oktober 2017 ISSN: 2252 7141
15	Putri Meilia dan Adnan (2017). Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Alat analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa <i>Financial Distress</i> , Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Volume 2, No. 4 (2017) Halaman 84-92 E-ISSN: 2581-1002
16	Putu Novia Hapsari Ardianti (2019). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018	Variabel Independen: Komite Audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> Alat analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa Profitabilitas dan Komite Audit tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 26, No. 3, Maret (2019):2020-2040 ISSN: 2302-8556
17	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014	Variabel Independen: Komite Audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling:	Variabel Independen: Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Proporsi Kepemilikan Institusional tidak	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 16, No. 1, Juli (2016): 702-732 ISSN:

		Purposive Sampling	Alat analisis: Regresi Linier Berganda	berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	2302-8556
18	Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017). Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Alat analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil dari Penelitian ini menyatakan bahwa Dewan Direksi Berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Manajerial Ownership</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Volume 6, No. 2 (2017) Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806
19	Richmadenda dan Dudi Pratomo (2018). Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016	Variabel Independen: Komite Audit, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Audit Tenur Lokasi Penelitian: Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>e-Proceeding of Management</i> , Volume 5, No. 3, Desember (2018) Page 3342 ISSN: 2355-9357
20	Rimi Gusliana Mais dan Dewi Patminingsih (2017). Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik Sampling: Purposive Sampling	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Alat analisis: Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Ukuran Komisaris Independen, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Jurnal STEI Ekonomi, Volume 26, No. 02, Desember (2017)
21	Taufiq Marwa (2018). Studi pada	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa	<i>Електронне наукове фахове</i>

	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017	<i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer Pricing, Capital Intensity</i> Alat analisis: Regresi Linier Berganda	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	видання з економічних наук (<i>Modern Economic</i>), Volume 11, No. 10 (2018), page 122-128 ISSN: 2521-6392
22	Tobias Bornemann (2018). 18 Negara tahun 1995-2010	Variabel Independen: <i>Accounting Conservatism</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Lokasi Penelitian: 18 Negara tahun 1995-2010	Hasil dari Penelitian ini ditemukan bahwa pada kondisi Konservatisme secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pemotongan tarif pajak dimasa depan ketika kesesuaian buku pajak tinggi. Efek ini sangat menonjol untuk perusahaan yang memusatkan mayoritas operasi mereka di negara dimana tarif pajak dipotong. Sebaliknya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara penghindaran pajak dan kondisi bukan konservatisme.	<i>WU International taxation Research Paper</i> series No. 04 (2018) http://ssrn.com/abstract=3114054

Tita Dwi Rahayu (2022): Pengaruh *Firm Size*, *Financial Distress*, Konservatisme akuntansi, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2020), Variabel X1 (*Firm Size*), X2 (*Financial Distress*), X3 (Konservatisme akuntansi), X4 (Komite Audit), Variabel Y (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, dan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan dengan judul ” **PENGARUH *FIRM SIZE*, *FINANCIAL DISTRESS*, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Survei pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2020)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang dapat diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang keilmuan dan pemahaman mengenai pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang serupa.
3. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk mengetahui pentingnya informasi *tax avoidance* dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu Akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, yaitu memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit, sehingga perusahaan dapat meminimalisir *tax avoidance* yang dapat merugikan perusahaan.
2. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pengaruh *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi, komite audit terhadap *tax avoidance* sehingga dapat menjadikan acuan dalam pembuatan keputusan perpajakan Indonesia.
3. Bagi pengguna laporan keuangan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2020. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* masing-masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2022 (Lampiran 1).